



Buletin Parlementaria

Nomor 1066/III/VIII/2019 • Agustus 2019



4TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

Indonesia Harus Mengejar Ketertinggalan



4 Indonesia Pererat
Kerja Sama
dengan Kazakhstan



11 Komisi V Minta Jalan
Layang Medan - Berastagi
Diprioritaskan



9 772614 339005



Foto bersama Pimpinan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI dengan Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2019. Foto: Jaka/HR

Indonesia Harus Mengejar Ketertinggalan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dukungannya atas rencana pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa mendatang. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu, Indonesia harus berlari mengejar ketertinggalannya, sehingga cita-cita bangsa untuk menjadi negara maju pada 2045 dapat terwujud, dimana terbentang luas tantangan yang mesti dihadapi.

“Indonesia harus mengejar ketertinggalannya, dengan berlari lebih cepat untuk meraih kemajuan. Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI mendukung tema yang dipilih oleh Pemerintah dalam merayakan hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu ‘SDM Unggul, Indonesia Maju’,” papar Bamsoet saat membacakan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020,

di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Pada Rapat Paripurna DPR RI ini, juga beragendakan pembacaan Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam Rapat ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang beserta para Wakil Ketua DPD RI, para Menteri Kabinet Kerja dan sejumlah Pimpinan Lembaga Negara non-Kementerian.

Bamsoet menuturkan, Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam pemerintahan. Rekonsiliasi politik pasca – Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilakukan demi merajut kembali persatuan dan kesatuan. Sehingga diharapkan semua elemen bangsa dapat berbenah bersama untuk pembangunan nasional.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, untuk mendukung akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2020 - 2024, maka perlu dukungan APBN yang berkesinambungan. Politik anggaran harus terus diarahkan pada penajaman anggaran dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelatihan kerja.

Di bidang pendidikan, RAPBN 2020 difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan SDM Indonesia yang kompatibel dengan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta percepatan revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Kemudian di bidang kesehatan, RAPBN 2020 diupayakan dapat meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkeadilan, pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang efektif dan efisien.

Sementara bidang pelatihan kerja, RAPBN 2020 juga sudah mencerminkan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia di bidang *science, technology, engineering, dan mathematics* (STEM), penguatan *link and match* pelatihan dengan dunia industri, serta penguatan sinergitas antara lembaga-lembaga pelatihan dengan pemerintah daerah, komunitas, dan dunia industri.

Menurut Bamsoet, beberapa fokus utama RAPBN tersebut harus menjadi komitmen bersama untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Ia juga mengingatkan, masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai masalah fundamental di abad ke-21. Perkembangan teknologi yang begitu sangat cepat serta begitu banyak disrupsi di berbagai sendi kehidupan harus menjadi perhatian bersama agar siap menghadapi era persaingan global.

Bamsoet menambahkan, ke depannya, produk legislasi yang disusun oleh DPR RI akan mendukung pembangunan SDM yang unggul. Hal ini sesuai dengan tema pemerintah dalam merayakan hari kemerdekaan tahun ini, yaitu "SDM Unggul, Indonesia Maju". "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR berpandangan agar penyusunan legislasi ke depan harus mendukung prioritas pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," papar Bamsoet.

Dalam kaitan itu, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kehadiran RUU ini diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan

inovasi dan inovasi.

Sementara itu, saat membacakan Pidato Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia'. Kebijakan RAPBN 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur.

Defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sebesar Rp 307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan, SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.

Untuk itu, pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun. "Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi," jelas Presiden Jokowi.

Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa. Pada tahun 2020, Pemerintah juga memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan Beasiswa Bidikmisi. ■ [ann,eko/sf](#)



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P., S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah,
Geraldin Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

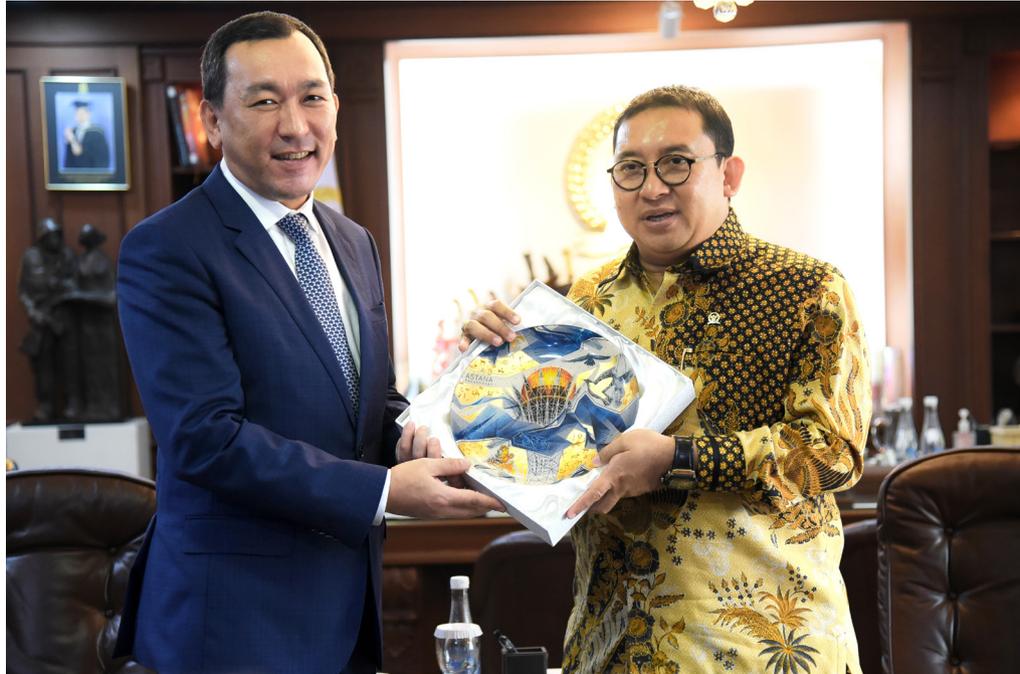
Indonesia Pererat Kerja Sama dengan Kazakhstan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Republik Indonesia Daniyar Sarekenov, guna mempererat kerja sama Indonesia dengan Kazakhstan. Kerja sama yang dimaksud berupa hubungan antar kedua negara melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), agar dapat membuka pasar yang luas, seperti kerja sama bisnis, ekonomi, perdagangan, maupun kerja sama lain di bidang lain baik pertahanan maupun bidang-bidang yang diinginkan kedua negara.

“Kedua negara sudah ada kerja sama melalui GKSB, yang sudah kita dirikan sejak 2 tahun lalu. Tentu, kita dalam diplomasi parlemen mendukung diplomasi kedua negara supaya kita bisa membuka pasar yang luas, kerja sama bisnis, ekonomi, perdagangan, dan sebagainya, maupun kerja sama di bidang lain, baik pertahanan maupun bidang-bidang yang kedua negara inginkan,” ujar Fadli usai menerima kunjungan Dubes Kazakhstan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/8).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga memberikan undangan kepada Dubes Kazakhstan agar turut hadir pada *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD)* di Bali, September mendatang. “Undangan itu ditujukan kepada Dubes maupun Parlemen Kazakhstan agar dapat turut hadir dalam *World Parliamentary Forum on SDGs* yang ketiga di Bali pada bulan September mendatang,” tandas Fadli.

Sebelumnya, politisi Fraksi Partai



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima cenderamata dari Duta Besar Kazakhstan. Foto: Geraldi/HR

”

...DALAM DIPLOMASI PARLEMEN Mendukung DIPLOMASI KEDUA NEGARA SUPAYA KITA BISA MEMBUKA PASAR YANG LUAS, KERJA SAMA BISNIS, EKONOMI, PERDAGANGAN, DAN SEBAGAINYA, MAUPUN KERJA SAMA LAIN DI BIDANG LAIN, BAIK PERTAHANAN MAUPUN BIDANG-BIDANG YANG KEDUA NEGARA INGINKAN

Gerindra ini bersama dengan Dubes Kazakhstan juga mendiskusikan mengenai persiapan konferensi Eurasia (Europe – Asia) yang akan dilaksanakan tanggal 25 September di ibu kota Kazakhstan, Astana, yang sekarang berubah menjadi Kota Nur Sultan. Acara tersebut diikuti oleh 55 negara dan Indonesia akan mengirimkan 5 delegasi dalam acara tersebut.

“Mereka datang dalam rangka untuk diskusi tentang persiapan Konferensi Euro Asia yang akan diselenggarakan kota Nur Sultan pada tanggal 25 September mendatang. DPR RI akan mengirim delegasi 5 orang dalam kegiatan Konferensi Euro Asia yang biasanya diikuti oleh 55 negara,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu.

■ pun,rfk/sf

Impor Rektor Asing Bukti Ketidaksanggupan Pemerintah Modernisasi Kampus

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa upaya meningkatkan ranking perguruan tinggi negeri merupakan tugas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan bukan menjadi tanggung jawab pihak asing. Menurutnya, langkah impor rektor asing menunjukkan bukti ketidaksanggupan Menristekdikti dalam memodernisasi kampus negeri

yang ada.

“Yang bertanggungjawab regulatif dan konsep operasionalnya ada pada pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan sebagai pengelola sektoral. Menristekdikti adalah pengelola sektoral, kenapa dia tidak memakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga sektor itu menjadi maju. Bukannya malah lepas tangan kepada orang lain,” tandas Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

”

YANG BERTANGGUNG-JAWAB REGULATIF DAN KONSEP OPERASIONALNYA ADA PADA PEMERINTAH SEBAGAI PEMBUAT UNDANG-UNDANG DAN SEBAGAI PENGELOLA SEKTORAL. MENRISTEKDIKTI ADALAH PENGELOLA SEKTORAL,...



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Eno/HR

Fahri mengatakan, pemerintah harus memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan ranking perguruan tinggi. Konsep itu lantas dijalankan Kemristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan di perguruan tinggi. “Seharusnya konsep memodernisasi kampus itu datangnya dari pemerintah, bukan pihak asing,” ujar legislator dapil NTB itu.

Diketahui, guna meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia agar memiliki daya saing tingkat internasional, pemerintah berencana akan mendatangkan rektor asing yang berkualitas. Saat ini terdapat 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, namun yang masuk daya saing dunia hanya tiga perguruan tinggi saja. Salah satu tujuan pemerintah mengimpor rektor asing tersebut adalah untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia agar masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. ■ dep/es



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi *House Democratic Partnership (HDP)* Kongres Amerika Serikat. Foto: Gerald/HR

Komisi I Dukung Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS

Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi *House Democratic Partnership (HDP)* Kongres Amerika Serikat yang dipimpin Anggota Kongres AS David Price. Memimpin pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan perlu ada peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pertemuan yang turut dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana, Evita Nursanty, Junico BP Siahaan, dan Jerry Sambuaga ini merupakan bagian dari program kerja sama antara parlemen Indonesia-AS untuk meningkatkan kinerja dan kualitas

parlemen, baik dalam bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Tidak hanya itu, pertemuan DPR RI-Kongres AS juga membahas banyak isu terkait hal-hal yang bisa dilakukan antara kedua pihak. Salah satunya, kerja sama pertahanan Indonesia dan AS, dimana sebelumnya sempat terjadi embargo AS terhadap Indonesia dan terhambatnya pelatihan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI AD.

"Mereka (Kongres AS) bersedia untuk menyelesaikan sepenuhnya, atau menuntaskan permasalahan tersebut. Memang kerja samanya sudah meningkat menjadi sebuah *strategic partnership* antara Indonesia-Amerika Serikat, tetapi dari sisi kongres masih

belum disesuaikan. Sehingga mereka punya kesediaan untuk membereskan hal tersebut," ungkap Hanafi di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta baru-baru ini.

Meski Hanafi mengakui hal ini bukan permasalahan yang cukup besar, namun ini cukup menghambat ketika level kerja sama Indonesia-AS sudah meningkat ke level *strategic cooperation*. "Sebaiknya tidak ada lagi masalah. Seperti misalnya Kopasus yang tidak bisa melakukan *training* di Amerika, karena itu kan sudah masa lalu. Dengan terbukanya *strategic cooperation*, masalah itu harusnya sudah tidak ada lagi di Kongres (AS)," tutup Hanafi. ■ alw/sf



Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali. Foto: Runi/HR

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendorong disegerakannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Data Pribadi. Menurutnya, apabila RUU Data Pribadi berhasil disahkan menjadi Undang-Undang tentunya data kependudukan yang diberikan masyarakat untuk kebutuhan tertentu dapat terjaga dengan aman.

Zainuddin Amali Dorong Penyelesaian RUU Data Pribadi

Namun yang sangat disayangkan adalah RUU tersebut hingga saat ini masih *mandek* pengerjaannya di pihak pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi isu dugaan jual beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tengah viral di media sosial belakangan ini.

“Saya mendorong lahirnya undang-undang keamanan data pribadi. Jadi, siapa pun yang menerima *copy* dari data seseorang, dia harus menyimpannya. Jadi, kalau sudah selesai tidak bisa dibuang begitu saja. Nah, itu ada sanksinya,” tutur politisi Partai Golkar tersebut ketika ditemui *Parlementaria* baru-baru ini.

Zainudin menjelaskan, kerahasiaan data masyarakat di Dukcapil harus benar-benar terjamin. Oleh sebab itu,

perlu adanya UU keamanan data pribadi. Namun, ia melihat kebocoran data pribadi terjadi secara tidak disadari. “Kadang kita yang memberikan (data pribadi). Kita masuk hotel pasti meninggalkan (KTP), kita kasih tiket pesawat sertakan *copy* KTP. Nah, di situlah muncul. Tercecer-tercecer (data) itu,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa RUU Data Pribadi merupakan pekerjaan rumah untuk DPR RI di periode yang akan datang. Hingga kini ia menyatakan bahwa belum ada draf UU yang masuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Belum ada saya dengar (draf UU dari Kominfo), kan DPR mau berakhir tanggal 30 September ya. Nah, ini PR dan pemerintah yang akan datang,” tandas politisi dapil Jawa Timur XI itu. ■ *er/sf*

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi dengan tema “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

“Sebut saja adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu

Sejatinya, lanjut Evita, ketika

berbicara tentang siber tidak hanya semata ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja, namun juga ada Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” tambahnya.

Undang-undang tersebut menurut Evita harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Bagaimana mengintegrasikan seluruh lembaga dan instansi yang terkait dalam siber. Sejauh ini Komisi I sebagai mitra dari BSSN malah belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut.

“Dari pada kita digugat di MK (Mahkamah Konstitusi) lagi, dirubah lagi, lebih baik dimatangkan saja dulu. Tidak mungkin duduk bareng dalam 1 bulan kedepan. Sehingga jika

dikatakan targetnya bulan September RUU ini harus disahkan, saya ragu. Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif. Intinya, UU ini kelak harus menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan siber yang ada serta mengintegrasikan seluruh badan instansi siber yang ada,” pungkasnya.

■ *ayu/es*



Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty. Foto: Arief/HR

Sarpras Polda NTT Masih Minim

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menemukan sejumlah fakta bahwa sarana, prasarana dan infrastruktur gedung Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) masih minim dan tidak layak. Bahkan beberapa waktu lalu ia sempat meninjau gedung penyelidikan perkara di Mapolda NTT, yang menurutnya sangat tidak layak. Ia mendorong renovasi infrastruktur Mapolda NTT.

“Oleh sebab itu, (beberapa waktu yang lalu) saya bicara dengan Asrena Mabes Polri, dan kita mendapat lampu hijau anggaran untuk renovasi Polda NTT,” kata Herman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT Irjen Raja Erizman dan jajaran, beserta Kapolres se-NTT di Mapolda NTT, Kupang, baru-baru ini.

Herman menambahkan, pihaknya juga memberi perhatian pada sarpras Polres di wilayah hukum NTT yang akan menangani 9 Pilkada pada tahun 2020 mendatang. “Sarpras Polres yang akan menangani Pilkada juga menjadi hal yang kami perhatikan. Mereka butuh alat komunikasi, kendaraan, dan sarpras lainnya karena jumlah personel tidak memadai,” tandas Herman.

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan itu juga mengaku prihatin dengan rasio jumlah personel polisi di Polda NTT dengan luas wilayah NTT, yang hanya berkisar 40 persen. Kapolda NTT menyebutkan, Polda NTT membutuhkan 22 ribu personel, namun kini hanya ada 9 ribu personel. “Kami prihatin dengan kondisi Polda. Rasio personel sangat *jomplang*,” imbuh Herman.

Di sisi lain, legislator dapil NTT

itu menambahkan, Komisi III DPR RI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda NTT, seluruh Kapolres, hingga Polsek dan Pospol di wilayah hukum NTT yang telah mengamankan dan mengawal hajatan Pemilu pada 17 April yang lalu, sehingga pesta demokrasi berjalan aman, nyaman, dan berhasil hingga hasil rekapitulasi.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Raja Erizman menjelaskan, dari kebutuhan 22 ribu personel Kepolisian untuk seluruh wilayah NTT, kini pihaknya hanya memiliki 9 ribu personel. Ia juga mengeluhkan mengenai pembentukan Polres di sejumlah wilayah NTT. Pasalnya hingga kini, masih ada Polres yang membawahi 3 kabupaten. Sementara terkait infrastruktur di Mapolda NTT, pihaknya telah mengajukan pembangunan gedung baru. ■ sf



Tim Kunker Komisi III DPR RI berfoto bersama Kapolda NTT. Foto: Sofyan/HR

Pemerintah **Harus Evaluasi** Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia



Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalsel. Foto: Eko/HR

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, pelanggaran keimigrasian makin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 lalu.

“Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap

kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan,” jelasnya saat rapat dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.

Dijelaskan Habib, pengawasan orang asing saat ini diambil alih oleh Kemenkumham, dulunya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kemenkumham meminta Komisi III DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Keimigrasian.

Saat dilakukan revisi terhadap UU Keimigrasian, Kemenkumham meminta untuk diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan.

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral,” jelasnya, seraya menambahkan Komisi III DPR RI mendorong agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi betul-betul *qualified* dalam mengatasi permasalahan ini. ■ rmm/es

Komisi IV Minta IPB Berikan Terobosan Baru Sektor Pertanian

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai implementasi dari nota kesepahaman bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan hal yang penting dan sangat dinantikan, sehingga IPB dapat memberikan terobosan baru pada sektor pertanian. Mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah pertanian yang sangat serius.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mencontohkan salah satu masalah yang harus mampu ditangani adalah bagaimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa perlu impor dari negara lain. Hal ini disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional "*Resource Governance for Future Agriculture*", usai penandatangan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Kampus IPB, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Bagaimana kalau bisa kita itu *enggak* impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa *sih* harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah ini yang harus kita luruskan. Kita minta MoU dengan perguruan tinggi ini, saya yakin juga akan mencetak kader-kader hebat dan para peneliti di sini yang kita mau minta ada terobosan-terobosan dalam sektor pertanian," tegas Edhy.

Edhy menjelaskan jika terobosan dalam sektor pertanian tentu akan memerlukan biaya tambahan. Saat ini ia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian pun bukanlah angka yang kecil. Ia berpendapat efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian, sehingga ke depannya jika anggaran pertanian ditambah maka harus mampu

mengurangi angka impor bahan pangan.

"Ya jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus. Kita tidak menampikkan bahwa kita tidak berdiri sebagai satu negara sendirian di dunia ini, tapi bukankah untuk menjaga ketahanan itu jauh lebih penting, karena ujungnya adalah untuk kedaulatan. Jangan *ngomong* kita berdaulat kalau ujungnya kita masih harus bergantung dengan negara lain," jelas Edhy.

Politisi dapil Sumatera Selatan I ini pun meminta IPB untuk memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian. Jika masalahnya ada pada anggaran, Edhy menyatakan siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN. Edhy pun siap untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya guna menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.

"Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi. Kan itu yang harus jadi terobosan. Ini baru satu produksi, yang lain dari peternakan apakah kita harus impor

sapi terus setiap saat? Kenapa tidak berani kita munculkan produksi sapi sendiri, padahal kita punya karyawan, punya tempat, punya masyarakat, punya petani. Tinggal bagaimana menyatukannya," tandas Edhy.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan saat ini IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi sehingga dapat menyejahterakan petani. Terkait tantangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, ia menyatakan kesiapan IPB dalam membantu pemerintah dengan inovasi-inovasi baru yang dapat dimanfaatkan para petani.

■ nap/sf

Ketua Komisi IV DPR RI
Edhy Prabowo.
Foto: Tasya/HR



Komisi V Minta Jalan Layang Medan - Berastagi Diprioritaskan

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta pembangunan jalan layang Kota Medan - Berastagi Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara agar diprioritaskan. Selain untuk mengurai kemacetan, akses ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut hasil alam dan komoditas hortikultura masyarakat Kabupaten Karo.

“Kami minta Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengkaji ini secepatnya, karena jalan tersebut karena sangat dibutuhkan masyarakat,” papar Anthon saat menerima audiensi Bupati Dairi, Bupati Karo dan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, akibat kemacetan yang sering kali terjadi, banyak sektor perekonomian yang terganggu, termasuk pengusaha sayur-mayur dan hortikultura. Kerugian itu ditaksir mencapai Rp 300 miliar per tahun. Dengan jalan layang tersebut diharapkan memangkas waktu perjalanan dan mengurai kepadatan kendaraan jalur Medan - Berastagi, maupun sebaliknya.

Rencananya, jalan layang tersebut akan dibangun di dua titik padat kendaraan, masing - masing di Desa Bandar Baru dan di depan PDAM Tirta Malem. Jalan ini dipakai untuk mengangkut hasil pertanian dari beberapa kabupaten dan mendukung pariwisata yang akan dibangun di sekitar Danau Toba,” sambung



Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing. Foto: Grace/HR

Anthon sembari berharap jalan layang itu mampu mendongkrak roda perekonomian antar daerah, khususnya sepanjang jalan Medan - Karo.

Untuk mendukung infrastruktur di kawasan pariwisata Danau Toba yang masuk dalam program strategis nasional, Anthon juga mendorong pemerintah membuat jalan lingkar luar Simalungun - Karo - Deli Serdang - Samosir agar tercipta konektivitas.

Sebelum bertemu Komisi V DPR RI, Komisi D DPRD Sumut, Bupati Deli Serdang dan Bupati Karo juga melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk mengusulkan pembangunan jalan tol Medan - Berastagi, namun usulan tersebut ditolak. Karenanya, diharapkan ada pembangunan

dua jalan layang sebagai alternatif mengatasi kemacetan parah yang sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun.

Dalam pertemuan itu, Komisi D DPRD Sutrisno Pangaribuan meminta dukungan anggaran pemerintah pusat untuk akses jalan Medan - Berastagi. Menurutnya, kegiatan perekonomian di Sumut ini sangat tergantung pada kualitas jalan Medan - Berastagi karena menghubungkan sejumlah kabupaten, seperti Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara, hingga Aceh Tenggara.

“Pembangunan jalan tol memperlancar perjalanan kendaraan dari dan ke Medan - Berastagi adalah keharusan, namun paling tidak adalah pembangunan jalan layang untuk atasi kemacetan,” ungkap Sutrisno. ■ ann/sf

Komisi V Apresiasi Progres Pembangunan Bandara NYIA

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi progres pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulon Progo, yang sangat cepat dibandingkan dengan bandara lainnya. Kendati pembangunan bandara ini begitu cepat, PT. Angkasa Pura I tetap memberikan prioritas bahwa pembangunan aman, nyaman dan menjaga keselamatan, serta prioritas terhadap mitigasi bencana.

“Kita (Komisi V DPR RI) ke bandara NYIA ini sudah tiga kali. Bandara ini merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia yang memiliki *underpass* terpanjang di Indonesia. Jika dilihat dari proses pembangunannya, bandara ini sangat cepat sekali, karena sudah selesai

sebelum target yang ditentukan,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

Novita berharap bandara ini menjadi salah satu andalan Indonesia, serta dapat mengangkat perekonomian daerah. Banyak program yang nantinya dilakukan di bandara yang menelan investasi triliunan rupiah ini dengan luasan lahan kurang lebih 20 hektar. Di sisi lain, bangunan bandara juga memiliki kualitas yang melebihi standar, karena di daerah tersebut berpotensi terjadi bencana alam seperti gempa, tsunami dan gunung meletus.

“Jadi setelah kita datang di awal bulan Juni kemarin sudah mulai ada penerbangan hingga sembilan maskapai dan bahkan bulan Desember

ini finalizasinya. Semoga saja bulan Desember itu kita bisa ke sini lagi untuk melihat 100 persen pembangunannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan atau belum,” tegas legislator Partai Gerindra tersebut. ■ cas/sf



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.
Foto: Chasbi/HR

Komisi V Sesalkan Terbengkalainya Pelabuhan Gunaksa

pembangunan Pelabuhan Gunaksa mulai direncanakan sejak tahun 2006.

“Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat memperhatikan secara serius persoalan ini, sehingga pelabuhan Gunaksa yang masih terbengkalai ini dapat terselesaikan,” kata Rendy usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Gunaksa, Bali, baru-baru ini

Legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Gunaksa telah menelan anggaran hingga Rp 200 miliar lebih pada tahun 2014. Namun sangat disesalkan pelabuhan ini belum dapat beroperasi. “Padahal anggaran yang sudah dianggarkan sekitar Rp 200 miliar lebih,” ucapnya.

Rendy mengatakan, sejumlah permasalahan yang menghambat pengoperasian pelabuhan tersebut adalah akses jalan menuju pelabuhan yang terputus akibat aliran lava dingin dari Gunung Agung yang meletus di tahun 2017 lalu. “Dari pantauan yang kami liat, akses jalan yang rusak mengakibatkan sulitnya pengoperasian Pelabuhan Gunaksa,” ujar Rendy.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Kementerian terkait untuk membahas permasalahan mangkraknya Pelabuhan Gunaksa. “Komisi V DPR RI akan membawa permasalahan ini di rapat kerja nanti setelah reses,” pungkask politisi PDI-Perjuangan itu.

■ qq/sf



Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido. Foto: Tasya/HR

Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido, meminta Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat secara serius untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pembangunan pelabuhan Gunaksa yang terbengkalai. Padahal

Komisi VII Panggil Direksi PLN Terkait Peristiwa Pemadaman Massal



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Foto: Jaka/HR

Komisi VII DPR RI telah memanggil Plt. Direktur Utama beserta jajaran Direksi PT. PLN (Persero) guna mempertanyakan kronologis seluruh kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada hari awal Agustus lalu.

“Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN. Rapat ini akan kami lanjutkan dalam masa sidang berikutnya untuk melakukan pendalaman. Kita juga akan melihat sampai dimana kejadian dan kasus ini bisa kita buka dan jelaskan kepada publik,” jelas wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup dengan Plt. Dirut PLN dan jajaran Direksi PT. PLN (Persero) di

”

KASUS INI JANGAN SAMPAI TERULANG KEMBALI, KARENA SANGAT MERUGIKAN MASYARAKAT DAN SELURUH INSTANSI YANG MEMAKAI JASA PLN.

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa baru-baru ini.

Saat ini PLN tengah membentuk tim, sambungnya, dan tim tersebut sedang bekerja. Nasir menyampaikan, PLN nantinya akan melaporkan seluruh hasil investigasinya kepada Komisi VII DPR RI. Selain dari PLN, tim

investigasi tersebut juga terdiri dari pihak-pihak lain yang direkrut oleh PLN untuk mendukung pelaksanaan investigasinya.

“Kasus ini jangan sampai terulang kembali, karena sangat merugikan masyarakat dan seluruh instansi yang memakai jasa PLN. Secara manajemennya mungkin tidak bermasalah, tetapi mungkin sistemnya yang akan diinvestigasi untuk mengetahui apa hasilnya,” tandas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Terkait masalah kompensasi ganti rugi yang dialami konsumen, Nasir mengatakan, masalah teknisnya diserahkan kepada pihak PLN. “Mengenai penyebab utama kejadiannya sendiri, hasilnya baru akan diketahui secara pasti setelah dilakukan investigasi,” pungkasnya. ■ dep/es

Rakyat Dirugikan Akibat Padamnya Aliran Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada awal Agustus lalu, telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang terdampak.

Kurtubi menyampaikan, dilihat dari sisi lamanya pemadaman listrik dan dari sisi daerah yang terdampak, hal itu sangat luar biasa. Sehingga rakyat merasa begitu menderita karena kehidupannya terganggu. Oleh karenanya, (hari ini) Komisi VII DPR memanggil Plt. Dirut PLN (Persero) beserta jajarannya guna mengetahui penyebab utama dari kejadian tersebut.

“Yang kita dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak

berfungsinya sistem transmisi sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Ungaran. Kami akan mendorong untuk dilakukan investigasi se-independen mungkin. Kita mengharapkan menguak secara jujur dan *fair* apa penyebab sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini,” kata Kurtubi di Gedung Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

Listrik di negara kita amat sangat penting keberadaannya, lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem itu. “Baru padam sekitar 12 jam, sudah banyak menyebabkan penderitaan. Contohnya pada operasional MRT. Bagaimana kalau kita sudah punya MRT dan LRT yang beroperasi ke segala arah, ataupun bagaimana kalau semua kendaraan listrik sudah beroperasi di

Indonesia,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini ada 30 pembangkit di Pulau Jawa. “Bagaimana mau meng-*handle* yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang ‘wah’,” ucap Kurtubi.

Ia berharap, kedepan pemerintah didalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. “Kita mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” tutupnya. ■ dep/es



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Foto: Jaka/HR

Komisi VI Apresiasi Pembangunan RISHA di Lombok

Bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2018 lalu meninggalkan banyak kerusakan sarana dan prasarana. Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun melakukan inovasi dengan membangun Rumah Instan Sederhana (RISHA) guna memenuhi kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi langkah Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi dampak dari bencana gempa di Lombok itu. Meski demikian menurut politisi Partai Gerindra itu, penyerapan masyarakat NTB terhadap pembangunan RISHA masih kurang optimal.

“Penyerapannya agak rendah, banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan rumah yang telah disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya karena berupa

rumah tipe 36,” ucap Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.

Hekal menambahkan, masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan rumah hunian. Menurutnya, RISHA merupakan hunian sementara yang bersifat cadangan dan tidak memaksa masyarakat untuk mengambilnya. “Tidak adanya konsisten dari Pemerintah dalam mewajibkan mengambil RISHA, yang pada akhirnya penyerapan rumah gempa ini dinilai rendah,” analisa Hekal.

Lebih lanjut Hekal menjelaskan, Pemerintah memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan RISHA hingga Desember 2019. Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI akan terus mengkaji pembanguan RISHA yang menurutnya tidak bernilai besar, tetapi *effort* dan pekerjaannya cukup menyita banyak perhatian. ■ hnm/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.
Foto: Hanum/HR

Bisnis Umrah, Traveloka dan Tokopedia Bisa Kerja Sama dengan Travel

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menjelaskan, menurut undang-undang tidak ada ruang bagi perusahaan *startup*, seperti Traveloka dan Tokopedia untuk menjadi penyelenggara Haji dan Umrah. Namun ia menilai, Traveloka dan Tokopedia memungkinkan terlibat dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah, melalui kerja sama dengan travel Haji dan Umrah yang ada di Indonesia.

“Jika Pemerintah Arab Saudi sudah berkomunikasi dengan Traveloka dan Tokopedia, mungkin kita bisa ambil jalan tengahnya, yaitu Traveloka dan Tokopedia bekerjasama dengan travel Umrah yang ada di Indonesia dalam urusan tiket dan hotel,” ujar Hamka usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, baru-baru ini.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, jika Traveloka dan Tokopedia sepenuhnya melaksanakan Haji dan Umrah, maka hal itu akan bertentangan dengan UU. Tetapi karena Menteri Komunikasi dan Informasi telah memberi lampu hijau untuk masuk dalam ranah pemberangkatan Haji dan Umrah, maka timbul sejumlah persoalan.

“Kalau ini ditangani 100 persen oleh Traveloka dan Tokopedia, maka jelas travel-travel Haji dan Umrah akan bubar. Ini kita anggap Menkominfo yang ingin melibatkan Traveloka dan Tokopedia, maka kemungkinan bisa kerja sama dengan travel Umrah dengan catatan hanya mengurus tiket dan hotel saja,” ujar legislator dapil Jawa Timur II itu.

Selanjutnya menurut Hamka untuk bimbingan ibadah, akomodasi, ziarah dan transportasi di Arab Saudi, lebih baik tetap ditangani oleh travel

Umrah. Sedangkan menurut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim, selama ini pelaksanaan Haji dan Umrah sudah berjalan dengan lancar. Jika Traveloka dan Tokopedia dilibatkan mungkin akan menimbulkan persoalan baru bagi mereka. ■ hnm/sf



Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq. Foto: Eno/HR

Rantai Diskriminasi Terhadap Kaum Disabilitas Harus Dipotong



Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf saat menerima cenderamata dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Foto: Azka/HR

Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf menegaskan, sudah saatnya negara hadir dan menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kaum disabilitas dengan memberikan pelayanan publik yang baik.

“Kita memotong rantai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang-orang penyandang disabilitas, di antaranya lewat *public service*,” tegas Nova saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk ‘Pendekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan’ di Ruang Abdul Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Nova yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis ini memaparkan, isu disabilitas harus ditangani oleh multi sektoral, minimal tiga lembaga negara di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri harus ikut dalam pembahasan aturan pengawasan ketenagakerjaan.

“Kemenakertrans sudah pasti harus masuk, kedua Kemensos, ketiga Kemendagri. Minimal tiga itu harus ikut dalam RUU Pengawasan Ketenagakerjaan yang bisa berpihak pada aspek-aspek disabilitas, supaya bisa termaktub di dalam RUU tersebut,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia juga menyampaikan, alokasi anggaran bagi penyandang disabilitas merupakan aspek pendukung yang penting. Saat ini alokasi anggaran bagi penyandang cacat terpusatkan pada satu kementerian saja, yaitu Kemensos, di Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Sedangkan pada tahun 2018, Pemerintah hanya mengalokasikan 0,014 persen anggaran nasional untuk isu disabilitas yaitu sebesar Rp 323 miliar dari total anggaran nasional Rp 2.400 triliun. Menurut Nova, para pemangku kepentingan harus punya komitmen kuat dari aspek regulasi, anggaran, dan pengawasan demi menghentikan diskriminasi pada kaum disabilitas. ■ eko/es

Berdayakan Rektor Lokal Untuk Tingkatkan Kapasitas PT

Para rektor lokal yang memimpin sejumlah perguruan tinggi (PT) di tanah air sebaiknya kembali diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas kampus agar masuk kelas dunia. Saat ini, baru tiga PT di Indonesia yang masuk peringkat dunia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemberdayaan para rektor lokal lebih populis daripada harus mengimpor rektor asing.

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti saat dimintai komentarnya lewat saluran *Whatsapp* soal polemik impor rektor asing itu kepada **Parlementaria**, baru-baru ini mengatakan, sejauh ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) belum berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI soal impor rektor asing. Tak ada notulensi atau catatan persetujuan dari Komisi X RI.

“Kalau kebijakan mengimpor rektor asing hanya untuk mencapai target 2024 menjadi 5 perguruan tinggi, mengapa kita tidak membuat *mapping* sendiri dan memberdayakan rektor-rector Indonesia yang sudah mampu perguruan tingginya masuk peringkat dunia, diberikan penghargaan dan kesempatan bagi para rektor tersebut dengan anggaran yang memadai untuk melakukan *assessment* dan memberdayakan perguruan tinggi yang ditargetkan pemerintah,” ulasnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Indonesia mampu meningkatkan kapasitas PT dengan melakukan evaluasi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum dan dibebani target menjadi *world class university*. Pemerintah harus melihat apakah anggaran dan fasilitas sarpras

standar internasionalnya selama ini sudah terpenuhi atau belum. Bukan justru dengan menempatkan rektor asing di PT dalam negeri. Ini bukan hanya persoalan individu rektor.

“Kita punya rektor di Indonesia yang berprestasi dan mampu PTN-nya masuk peringkat dunia. Mengapa tidak kita hargai dan kita manfaatkan dengan baik? Bila indikator program dalam renstra belum tercapai, kita evaluasi bersama mengapa jumlah perguruan tinggi yang masuk peringkat dunia tidak beranjak dari 3 PT? Tetapi jalan keluarnya tidak harus mencari rektor asing. Kita berdayakan potensi para rektor Indonesia yang telah mampu mencapai target peringkat dunia,” tandasnya.

Legislator dapil Jawa Tengah X ini memaparkan, akar masalah yang menghambat pencapaian peringkat dunia PTN di Indonesia salah satunya adalah dilema birokratisasi. Dalam UU Dikti sudah ada otonomi akademik PTN. Tetapi PTN masih banyak dibebani dengan aturan-aturan yang menghambat inovasi dan keberanian untuk melakukan

reformasi. “Di PTN *politicking* sangat kental dalam pemilihan rektor, dekan, dan lain-lain. Idealnya tidak melihat dari *merit system*,” tandasnya.

Akar masalah lainnya adalah soal anggaran dan pendapatan PTN-BH yang diharapkan mampu *generate income* lewat kerja sama industri. Pada kenyataannya masih banyak *generate income* dari SPP mahasiswa. Porsi terbesar *income* masih dari mahasiswa. Selain itu, PTN-BH belum mampu mengembangkan bisnis. Baru UI yang berhasil merekrut tenaga profesional non dosen untuk mengembangkan usaha.

“Menurut saya, buat *road map* yang jelas untuk 5 tahun ke depan, berapa PT yang ditargetkan dan didukung anggaran serta kebijakan. Insya Allah Indonesia mampu memperdayakan kekuatan bangsa sendiri.

Bukan karena anti-asing, tapi rektor bukan satu-satunya komponen untuk meningkatkan peringkat dunia,” tutup Marlinda.

■ mh/sf

Anggota Komisi X DPR RI
Marlinda Irwanti
Foto: Jaka/HR





Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar.
Foto: Husen/HR

Melihat geografis, Provinsi Lampung yang sangat terbuka di ujung Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Pulau Jawa, potensi untuk maju sangat tinggi. Tidak saja potensi perairan, tapi juga pariwisatanya

Provinsi Lampung Berpotensi Maju

masih terbuka untuk terus digali. Apalagi sudah ada infrastruktur jalan tol yang menghubungkan lintas Sumatera.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Lampung, baru-baru ini. Bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bandar Lampung, Ana menyebutkan, dengan sumber daya manusia yang multietnis, sebetulnya Lampung bisa mengalahkan provinsi lain di Sumatera. Namun, fakta berbicara lain. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran terbuka masih tinggi.

“Provinsi yang sangat luas dengan potensi SDM yang lumayan dan multietnis. Saya yakin sekali Lampung bisa berkembang pesat. Bahkan, bisa

mengalahkan provinsi lain. Sayangnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Padahal, Lampung punya potensi yang cukup baik. Ini PR penting bagi pemerintah provinsi untuk mengembangkan SDM supaya lebih maju,” ungkap politisi Partai NasDem.

Peluang yang bisa dikembangkan Lampung, sambung Ana, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak komoditas yang bisa diperdagangkan oleh UMKM setempat. Dari pertanian hingga perikanan sangat potensial dikembangkan. “UMKM-nya berpotensi baik dengan modal SDM yang banyak. Dari sisi pariwisata Lampung punya gunung Krakatau yang bila digali potensi dan diperbaiki infrastrukturnya pasti akan maju,” pandang Ana lebih lanjut. ■ mh/sf

Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup Lima Tahun

Anggota Komisi XI DPR RI Nur Purnamasidi meminta Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta menuju ibu kota baru dalam kurun waktu lima tahun. Sebab menurutnya masih banyak aspek seperti psikologis masyarakat Indonesia dalam menghadapi isu tersebut yang harus disiapkan selain pembangunan fisik.

“Dari *timeline* yang disampaikan oleh Bappenas, saya belum melihat adanya persiapan dalam hal sosial budaya. Tahun 2021, 2022 ini semuanya hanya menyangkut kesiapan fisik. Bagaimana menyiapkan landasannya, ini yang menurut saya harus disiapkan, misalnya 15-20 tahun ke depan lagi ada potensi apa yang harus disiapkan infrastruktur ekonomi untuk masyarakat,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Tengah, baru-baru ini.

Nur Purnamasidi menambahkan

bahwa mental masyarakat ini perlu dijaga. Perkembangan informasi yang begitu cepat dan tidak memiliki esensi keberimbangan akan cepat membentuk opini yang tentu akan bisa mengganggu eksekusi isu strategis pemindahan ibu kota ini, apalagi ia berujar Pemerintah bertaruh kepada 1,6 juta penduduk masyarakat yang akan mereka pindahkan.

“Kalau Jakarta itu orangnya sangat terbuka, mungkin juga orang Dayak sama. Tapi ada titik di mana ketika persaingan ke depan sudah sangat keras, ini yang harus kita pikirkan juga. Makanya saya bilang ke Pak Menteri, tolong dipikirkan masak-masak jangan hanya 5 tahun targetnya, tapi antara 10 tahun sampai 15 tahun mengingat bukan hanya pembangunan fisik yang harus jadi perhatian,” imbuhnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut secara gamblang mendorong pemerintah dalam hal ini digawangi oleh Bappenas untuk melakukan

kajian ulang terhadap rencana lima tahun pemindahan ke ibu kota baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan siap dilakukan di tahun 2024 dan pemindahan tersebut didasari untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. ■ er/sf



Anggota Komisi XI DPR Nur Purnamasidi. Foto: Erlangga/HR

Legislator Pertanyakan PT. Bentoel Yang Terus Merugi

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) selaku pemilik saham PT. Bentoel International Investama yang selama 7 tahun terakhir mengalami kerugian. Padahal pembayaran royalti ke perusahaan induk terus meningkat.

Demikian diungkapkan Heri usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan PT. Bentoel International Investama, Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jawa Timur III, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

“BAT ini merupakan perusahaan penanaman modal asing yang ada di Indonesia, dalam prosesnya selama 7 tahun berturut-

turut ini merugi. Kami melihat dengan adanya PMK Nomor 169 tahun 2015 terkait dengan masalah aturan pinjaman kepada afiliasi usaha ataupun anak perusahaan, tahun 2016 BAT melunasi pinjaman anak perusahaan kepada induknya senilai Rp 12 triliun,” kata Heri.

Ia menduga ada kemungkinan BAT ini memberikan pinjaman kepada afiliasi anak perusahaan atau membuat catatan seolah-olah perusahaan tersebut terus merugi. Kalau dilihat dari likuidasi atau catatan konsolidasi induk perusahaan, pendapatan terkait dengan royalti terus meningkat, namun di sisi lain ada beban bunga yang juga meningkat terkait beban bunga pinjaman.

“Adapun tanggapan dari PT. Bentoel ataupun dari BAT itu sendiri, mereka menyatakan apa yang sudah dilakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tentunya kami tidak berkompeten untuk menilai itu, karena laporan ini kan adanya ke Dirjen Pajak dan ke Dirjen Bea Cukai,” ujar politisi dapil Jawa Barat IV itu.

Ia menuturkan terkait dengan masalah pinjaman afiliasi yang berhubungan ke luar negeri seperti ke negara Belanda ataupun negara Inggris yang mengatur masalah *tax* tidak sampai 10 persen dan lain sebagainya, ini menjadi kewenangan adanya di

ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Harapan kami dengan adanya rapat berbarengan antara industri dengan regulator, tentunya ini bisa saling sinergi untuk saling menguatkan fungsi pengawasan. Kami berharap ke depan hal-hal seperti ini bisa menjadi perhatian yang sangat serius dan bisa segera ditindaklanjuti, tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini berharap adanya keterbukaan yang lebih *fair* antara pelaku usaha dengan regulator, agar penerimaan negara bisa dioptimalkan untuk menutupi defisit neraca transaksi berjalan.

Pada kesempatan itu, Direktur PT. Bentoel Distribusi Utama Adi Wibowo mengatakan pihaknya selama ini sudah berusaha transparan dan patuh pada regulasi yang ada. Salah satunya dengan menyampaikan kepada Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 24 Mei 2019.

Di dalamnya disampaikan bahwa Bentoel Group tidak benar menghindari pajak, juga disampaikan faktor penyebab rugi bersih yang dibukukan Bentoel sejak 2012 hingga sekarang. Kemudian disampaikan pula nilai investasi Bentoel Group, negara tujuan ekspor serta pembayaran cukai dan berbagai jenis pajak.

Terkait dengan ketidakpuasan jawaban terhadap pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI, PT. Bentoel akan segera menyiapkan laporan tertulis yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI. “Saat ini Bentoel Group sedang menyiapkan jawaban tertulis untuk disampaikan kepada Komisi XI DPR RI. Bentoel Group berharap jawaban tertulis tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi komisi XI dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkas Adi. ■ es



Anggota Komisi XI DPR
Heri Gunawan.
Foto: Erman/HR

BK DPR dan Unswagati Sepakati Kerja Sama **KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI sekaligus Sekertariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati). Dalam nota kesepahaman tersebut, BK DPR RI dengan Unswagati sepakat bersama-sama menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat.

“Dalam rangka mendorong peran serta aktif dalam pembangunan nasional, berbagai jenis program pengabdian kepada masyarakat

dapat dilaksanakan dalam perguruan tinggi dan salah satunya mengadakan KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat seperti yang dilaksanakan oleh Unswagati Cirebon ini,” ujar Indra dalam sambutannya di Aula Unswagati, Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini.

Indra menyambut baik atas terselenggaranya program KKN ini dan berharap pelaksanaan program KKN dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, sebagai bekal kepada para mahasiswa diperlukan penambahan pengetahuan melalui penyelenggaraan kuliah umum.

“Melalui kuliah umum seperti ini, diharapkan mahasiswa Unswagati memperoleh pengetahuan tambahan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa,” ujar Indra

Acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar, rektor dan civitas akademika Unswagati serta para mahasiswa. Indra berharap, ke depan kerja sama yang dibangun akan lebih intensif, produktif, transparan dan akuntabel. ■eno/es



Plt Kepala BK DPR RI Indra Iskandar usai menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Foto: Eno/HR

Caraka Malam untuk Latih Mental CPNS Setjen dan BK DPR

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Rahaju Setia Wardani mengatakan, kegiatan Caraka Malam yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI merupakan simulasi dimana seorang abdi negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menjaga kerahasiaan negara. Baik dari gangguan, tantangan, maupun godaannya.

“Oleh karena itu, pada kesempatan (Caraka Malam) ini mereka dilatih untuk tetap teguh, tetap jujur, serta menjaga mental dan etika,” jelasnya di sela-sela kegiatan diklat CPNS Setjen dan BK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7). Diklat CPNS Setjen dan BK DPR RI diselenggarakan pada 5 Agustus 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019 di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Jawa Barat.

”

PADA KESEMPATAN (CARAKA MALAM) INI MEREKA DILATIH UNTUK TETAP TEGUH, TETAP JUJUR, SERTA MENJAGA MENTAL DAN ETIKA,”

Yayuk, sapaan akrab Rahaju menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan diklat ini agar seluruh peserta diklat



Kepala Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI Rahaju Setia Wardani. Foto: Agung/HR

CPNS Setjen dan BK DPR RI siap menerima tantangan untuk menjaga kerahasiaan negara. Hal ini sesuai dengan misi pembelajaran selama kegiatan diklat berlangsung.

“Seluruh peserta sudah terlatih secara disiplin sesuai dengan proses pembelajaran yang telah diterapkan sejauh ini. Sehingga untuk menerima tantangan sebesar apapun, mereka (peserta diklat CPNS Setjen dan BK DPR RI) dapat konsisten sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional,” ungkapnya seraya mengingatkan diklat hanya dilakukan satu kali, sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Lebih lanjut, sebagai generasi milenial yang paham akan perkembangan informasi teknologi (IT), Yayuk

berharap para CPNS dapat membawa perubahan yang signifikan pada lembaga DPR RI menuju perbaikan di era modern. Sebagai Kepala Pusdiklat, ia mendorong kepada seluruh CPNS agar bisa bekerja dengan baik nantinya.

“Apalagi di DPR, dimana DPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang yang sering kali dalam pembahasannya dinyatakan tertutup sehingga terdapat rahasia-rahasia negara dan kebijakan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Hal ini menjadi tantangan sekaligus tugas CPNS DPR RI kelak sebagai *supporting system*-nya dewan yang harus bisa menjaga kewibawaan, keamanan dan kerahasiaan dengan optimal,” harapnya. ■ dip/sf

Sekjen DPR Serahkan Hewan Kurban

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Baiturrahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hewan kurban pada Idul Adha tahun ini meningkat signifikan. Ritual tahunan Idul Adha ini mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

Ada 11 sapi dan 7 kambing yang disembelih untuk dibagikan kepada para mustahik yang ditargetkan mencapai 4000 paket daging kurban. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyumbang satu sapi, begitu

juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dan Mekar Melati Utut Adianto, masing-masing menyumbang satu sapi. Sekjen DPR RI sendiri menyumbang satu kambing pada kurban tahun ini.

“Tahun ini ada peningkatan signifikan. Ada 11 sapi dan 7 kambing baik dari pimpinan DPR, DPD, MPR, dan fraksi-fraksi, bahkan para wartawan. Partisipasi kurban meningkat dengan cukup baik,” tutur Indra, Senin (12/8), usai menyerahkan hewan kurban. Panitia kurban segera mendistribusikan daging kurban ini

kepada petugas *cleaning service* dan PPNPN di lingkungan DPR RI, serta masyarakat sekitar Kompleks Parlemen.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Indra juga menyampaikan, ritual ini merupakan contoh dari ritual yang dilakukan Nabi Ibrahim. “Kita sedang meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail menyangkut keikhlasan dan kerelaan berkorban. Saya kira semangat rela berkorban ini yang terus menerus dipupuk oleh Bangsa Indonesia sehingga solidaritas sesama akan tetap terjaga,” pesan Indra.

Selalu ada hikmah memang saat berkorban. Ada hikmah vertikal dan hikmah horizontal yang didapat. Menurut Indra, hikmah vertikal adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Sementara hikmah horizontal adalah membangun solidaritas sosial terutama kepada kaum miskin agar bisa bahagia bersama. ■ mh/sf



Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Baiturrahman DPR RI. Foto: Ojii/HR



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berfoto bersama para Dubes negara sahabat. Foto: Runi/HR

Gelar WPFSD, DPR Komitmen Dukung SDGs

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sidang *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals* (WPFSD) merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia. Mengingat, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya agenda internasional, tetapi juga amanah UUD NRI 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau *no one left behind*.

“Kita mengadakan acara ini tidak hanya sekedar forum antar parlemen, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030 yang merupakan kesepakatan dunia” kata Nurhayati dalam acara *Embassy*

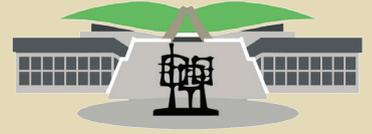
Briefing dengan mengundang Pimpinan DPR RI, BKSAP, dan para Duta Besar perwakilan negara sahabat dalam rangka persiapan Sidang ke-3 WPFSD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Nurhayati menuturkan, forum parlemen dunia inisiasi DPR RI ini untuk ke-3 kalinya akan diselenggarakan di Bali, pada 4-5 September 2019 mendatang, dengan mengangkat tema “*Combating Inequality Through Social and Financial Inclusion*”, forum ini akan menitikberatkan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurutnya, tema ini sangat tepat dibahas pada level parlemen, karena sesuai dengan fungsi kebijakan legislasi dan anggarannya.

“*Parliaments is in the heart of SDGs* artinya peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan pengawasan sangat penting dalam membuat anggaran bahwa harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Nurhayati menambahkan, SDGs merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipenuhi oleh Anggota DPR RI dengan pemerintah. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030 dengan tujuan akhir yaitu *no one left behind* atau tidak seorang pun yang tertinggal artinya tidak ada diskriminasi. Tidak melihat dari agamanya, etnisnya, tapi semua harus bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian di dunia ini,” tandas Nurhayati. ■ [ann,fr/sf](#)



Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Foto: Tim Parlementaria/HR

